

Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) Sebagai Implementasi Revitalisasi SMK (Studi Tata Kelola Kemitraan Pada SMK Swasta “DP” Di Jakarta Timur)

Nikma Zuhairoh¹, Indera Ratna Irawati Pattinasarany²

¹Magister Sosiologi Universitas Indonesia

²Staf Pengajar Magister Sosiologi Universitas Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Article history:</p> <p>Article Accepted: May 27 2021 Publication : July 03 2021</p>	<p><i>This study aims to examine the governance and partnership patterns of SMK "DP" with the Business / Industrial World (DU / DI). This partnership is an implementation of Vocational School Revitalization in an effort to increase the competence of graduates and work placements. Based on the theory of sociology, the partnership between SMK and the world of industry / business (DU / DI) can be analyzed using social capital theory according to Coleman. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data collection technique is done by observation, in-depth interview (indept interview), and document study. The results of this study indicate that SMK "DP" Jakarta has implemented partnership governance in cooperating with the Business World / Industrial World (DU / DI). This partnership is carried out in collaboration or through the MOU in terms of curriculum validation and synchronization, Field Work Practices (PKL), placement of graduates, vocational competency tests (UKK), job training for productive teachers, the first party Professional Certification Institute (LSP) _P1, and opening industrial vocational class. For SMK, the collaboration carried out is not only to improve the quality of graduates who are ready to work but also as a promotion and selling point of SMK to prospective new students. For the Business World / Industrial World (DU / DI), this partnership is a social contribution and responsibility towards improving the quality of SMK and fulfilling the workforce in accordance with industry needs.</i></p>
<p>Keywords:</p> <p>Vocational school revitalization, school partnership with industry, graduate competence</p>	
Article Info	Abstrak
<p>Article history:</p> <p>Artikel diterima: Mei 27 2021 Publikasi : Juli 03 2021</p>	<p>Studi ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola dan pola kemitraan SMK “DP” dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI). Kemitraan ini merupakan implementasi Revitalisasi SMK dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan, dan penempatan kerja. Berdasarkan teori Sosiologi, kemitraan SMK dengan Dunia Industri/Dunia Usaha (DU/DI) dapat dianalisis dengan menggunakan teori Modal sosial (<i>Social Capital</i>) menurut Coleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (<i>indept interview</i>), dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SMK “DP” Jakarta telah melaksanakan tata kelola kemitraan dalam menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI). Kemitraan ini dilakukan dengan kerjasama maupun melalui MOU dalam hal validasi dan sinkronisasi kurikulum, Praktek Kerja Lapangan (PKL), penempatan lulusan, uji kompetensi kejuruan (UKK), <i>job training</i> pada guru produktif, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP)_P1, dan pembukaan kelas vokasi industri. Bagi SMK, kerjasama yang dilakukan bukan hanya untuk meningkatkan kualitas lulusan yang siap kerja melainkan juga sebagai promosi dan nilai jual SMK kepada calon peserta didik baru. Bagi Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), kemitraan ini merupakan kontribusi dan tanggung jawab sosial terhadap peningkatan kualitas SMK serta pemenuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.</p>
<p>Keywords:</p> <p>Revitalisasi SMK, kemitraan sekolah dengan Industri, kompetensi lulusan.</p>	
<p>Corresponding Author: Nikma Zuhairoh Magister Sosiologi Universitas Indonesia Email Coresspondent: zuhairohnikma6@gmail.com</p>	

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Pendidikan yang paling sesuai untuk menghadapi tantangan globalisasi adalah pendidikan yang berorientasi pada dunia industri, sehingga sekolah kejuruan dalam proses pembelajaran harus bisa membuat pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri (Zainal Arifin, 2012). Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pengertian ini mengindikasikan bahwa output yang ingin dicapai dari proses pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah lulusan yang memiliki tingkat keterampilan tertentu sehingga siap memasuki dunia kerja (Walter dalam Kuswana, 2013:157).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tingkat pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi dibanding dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya. Angka pengangguran dari lulusan SMK pada Agustus 2018 mencapai 11,25%. Tingkat pengangguran tersebut lebih tinggi dari Februari 2018 sebesar 8,92% namun lebih rendah dibanding posisi Agustus 2017 sebesar 11,41. Tingkat pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan lulusan dengan jenjang pendidikan yang setara, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun lulusan lainnya. Angka pengangguran dengan jenjang pendidikan universitas pada Agustus 2018 sebesar 5,89%, lulusan Diploma (6,02%), lulusan SMA (7,95%), lulusan SMP (4,8%) dan lulusan SD (2,43%). (BPS : 2018).

Meningkatnya jumlah pengangguran dari siswa lulusan SMK disebabkan oleh tidak seimbangnya daya serap industri dengan jumlah angkatan kerja dari SMK. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan masih menghadapi berbagai macam persoalan dan kendala yang terus di upayakan untuk mencari solusinya. Menurut Sumarno (2008) hingga saat ini pendidikan kejuruan masih menghadapi kendala kesepadanan kualitatif dan kuantitatif. Kesepadanan kualitatif terjadi karena perkembangan teknologi di industri yang sangat cepat, sehingga terjadi kesenjangan kompetensi yang dimiliki lulusan sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Sementara itu, kesepadanan kuantitatif terjadi karena adanya ketidak seimbangan jumlah lapangan kerja yang ada dengan jumlah output pendidikan yang mencari pekerjaan.

Kendala lainnya yang harus dihadapi SMK di ungkapkan oleh Suryadi (2010 : 5) yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan di sekolah telah menimbulkan permasalahan struktural yang menjadikan kurangnya relevansi dengan lapangan kerja. Perkembangan program studi bersifat konstan (*constant*) karena perangkat pendidikan di bentuk secara legal-formal, yang dapat membatasi ruang kreatifitas para pengelola program dan terkesan “menghindari” perubahan (*variable*), bahkan teknologi baru pun lebih dahulu masuk ke dunia usaha karena mengikuti tuntutan pasar. Proses pendidikan di SMK diindikasikan terdapat gejala yang konsisten bahwa program pendidikan di SMK terisolasi dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri. Program pendidikan bersifat “*supply driven*” karena jenis program studi, materi pendidikan, cara mengajar, media belajar, evaluasi, dan sertifikasi lebih ditentukan oleh provider utama yaitu pemerintah. Program pendidikan kejuruan di sekolah kaku dan tidak lentur terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja. Program pendidikan belum berorientasi terhadap kebutuhan pasar kerja yang cepat berubah, sehingga terjebak dalam pameo “membidik sasaran yang bergerak” (*aimed at the moving target*). Jumlah rumpun dan program studi “relative tetap” tidak selaras dengan kebutuhan lapangan kerja yang berubah (Suryadi, 2010).

1.1. Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang :

Bagaimana SMK “DP” Jakarta melaksanakan tata kelola kemitraan dengan DU/DI sebagai implementasi kebijakan Revitalisasi SMK dan upaya peningkatan kualitas dan layanan terhadap peserta didik?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi yang dibutuhkan dalam menyoroti isu dan persoalan mengenai kemitraan antara SMK dan DU/DI dapat di gali lebih mendalam lagi dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan studi kasus dipilih untuk lebih memfokuskan isu dan persoalan mengenai tata kelola kemitraan SMK “DP” dengan DU/DI sebagai implementasi Revitalisasi SMK. Peneliti mencoba memberikan definisi dan deskripsi mengenai tahapan pengembangan tata kelola kemitraan yang dilakukan oleh SMK “DP” Jakarta dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) secara mutakhir hingga saat ini.

Peneliti berusaha mengilustrasikan kemitraan SMK dengan DU/DI secara spesifik sebagai implementasi Revitalisasi SMK, sehingga dapat memahami permasalahan tersebut dengan baik. Peneliti melakukan pengamatan terhadap tata kelola kemitraan SMK “DP” dengan DU/DI dari berbagai sudut pandang, yaitu kemitraan sebagai bentuk layanan sekolah terhadap peserta didik yang dapat dijadikan

sebagai daya jual SMK “DP” dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan Kemitraan sebagai upaya peningkatan kualitas kompetensi lulusan yang siap kerja. Peneliti telah lama berkecimpung di dalam lembaga ini sebagai tenaga pendidik, sehingga pengamatan telah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan pengambilan data yang terperinci dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kemitraan sebagai Implementasi kebijakan Link and Match

Dalam meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia usaha, pemerintah mengeluarkan kebijakan *link and match*. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang sepadan dengan kebutuhan berbagai sektor pembangunan akan tenaga ahli dan terampil sesuai dengan jumlah, mutu, dan sebarannya (Mulyasa : 2012 : 10). Menindaklanjuti Inpres No. 9 Tahun 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara gamblang menginstruksikan penyempurnaan dan penyusunan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan atau *link and match*.

a. Kemitraan SMK “DP” dengan DUDI melalui MOU.

SMK “DP” menjalin kemitraan dengan 22 perusahaan melalui kesepakatan/MOU antara kedua belah pihak dalam upaya meningkatkan kualitas SMK. Kemitraan ini meliputi pelaksanaan PKL, penyelenggaraan training/pelatihan baik pada tenaga pendidik ataupun peserta didik, rekrutmen tenaga kerja, maupun penyelenggaraan kelas vokasi industri. Selain menjalin MOU dengan 22 perusahaan tersebut, SMK “DP” juga memiliki hubungan kerjasama dengan kurang lebih 100 perusahaan dalam pelaksanaan PKL. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di sekitar wilayah Jabodetabek yang masih terjangkau oleh peserta didik dalam melaksanakan PKL. Beberapa perusahaan tersebut diantaranya ada yang merupakan instansi pemerintah, namun sebagian besar adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang yang sesuai dengan kompetensi keahlian di SMK “DP”.

b. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-1 SMK “DP”

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Sebagai organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, LSP dapat membuka cabang yang berkedudukan di kota lain.

Konsep LSP sudah ada seiring dengan keberadaan BNSP sebagai perpanjangan tangan dari BNSP dalam melaksanakan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi. Pembentukan LSP tersebut juga menjadi salah satu wujud implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Pada tahun 2018, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah melakukan full assessment ke Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-1 SMK “DP”.

c. Penyelenggaraan program kelas vokasi industri SMK “DP” Jakarta.

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden No 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, dan Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Peraturan Menteri Perindustrian, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, maka SMK “DP” telah mewujudkan di bukanya kelas vokasi industri Tahun Pelajaran 2019/2020. Program ini dilakukan atas kerjasama (MOU) dengan PT IGP (Inti Ganda Perdana) dan PT Morita Tjokro Gearindo. Seleksi penerimaan siswa kelas industri dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tes akademik, tes fisik, dan psikotes serta wawancara. Tes akademik terdiri dari 40 soal, terdiri dari 4 materi soal yang meliputi 10 soal Matematika, 10 soal Bahasa Inggris, 10 soal Bahasa Indonesia, dan 10 soal kejuruan. Melalui seleksi tersebut, akhirnya di terima 33 peserta didik di kelas vokasi industri.

Kurikulum yang diterapkan dalam kelas industri sangat berbeda dengan kelas regular, diantaranya alokasi waktu KBM full day mulai pukul 06.30-15.00 WIB. Muatan mata pelajarannya juga lebih banyak dibandingkan dengan kelas regular, khususnya dalam pelaksanaan praktek selama satu hari penuh yang dipandu oleh guru produktif dan perwakilan dari perusahaan. Berdasarkan kesepakatan melalui MOU, selama satu minggu sekali setiap hari jumat akan didatangkan trainer dari perusahaan IGP yang akan memberikan pelatihan fisik kepada peserta didik kelas industri sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja.

Penyelenggaraan kelas industri memberikan harapan pada peserta didik untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam meningkatkan kompetensi dan pengalaman yang lebih banyak dibandingkan kelas regular. Selain harus mengikuti ujian seleksi untuk bisa masuk ke dalam kelas

vokasi industri, peserta didik juga harus membayar SPP lebih mahal dibandingkan kelas regular. Hal ini sebanding dengan layanan KBM yang membutuhkan waktu ekstra dan pelaksanaan praktek yang lebih lama dibandingkan dengan kelas regular.

d. Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Rekrutmen Tenaga kerja

BKK merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan di SMK, karena BKK menjadi lembaga yang berperan mengoptimalkan penyaluran tamatan SMK dan sumber informasi untuk pencari kerja. Pemberdayaan BKK SMK merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sekolah yaitu sebagai bagian pembinaan terhadap proses pelaksanaan kegiatan BKK SMK yang telah direncanakan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan SMK. BKK SMK merupakan salah satu komponen pelaksanaan pendidikan sistem ganda, karena tidak mungkin bisa dilaksanakan proses pembelajaran yang mengarah kepada kompetensi jika tidak ada pasangan industri/usaha kerja, sebagai lingkungan kerja dimana siswa belajar keahlian dan profesional serta etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Rekrutmen tenaga kerja di SMK “DP” dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui rekrutmen secara umum dan melalui sistem ijon. Rekrutmen secara umum diinformasikan secara terbuka dan bisa diikuti oleh lulusan SMK dari sekolah lain, namun penyelenggaraannya dilakukan di sekolah “DP”. Setiap pelaksanaan rekrutmen yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan selalu mendapatkan respon yang positif oleh para pencari kerja lulusan SMK. Oleh karenanya, pelaksanaan rekrutmen ini biasanya dibanjiri oleh banyak peminat, sehingga aula di sekolah SMK “DP” cukup penuh untuk menampung para pencari kerja. Rekrutmen tenaga kerja melalui sistem Ijon berlaku bagi peserta didik SMK “DP” yang belum lulus. Sistem Ijon SMK BKK adalah suatu proses melamar kerja di perusahaan atau instansi tertentu yang nantinya bila siswa tersebut diterima kerja mulai kerjanya menunggu lulus dari sekolah. Pada umumnya seleksi kerja dilaksanakan semester II menjelang Ujian Nasional. Selain sistem ijon, perusahaan mitra juga bisa mengajukan permohonan tenaga kerja khusus alumni kepada pihak sekolah melalui bursa kerja khusus (BKK) yang informasinya dilakukan secara terbatas di WA group alumni atau website sekolah.

e. Pembentukan organisasi Pusat Pengembangan Karir Siswa (PPKS)

Dalam rangka peningkatan layanan di bidang peningkatan karir siswa serta bursa kerja khusus, diperlukan tim internal dari sekolah untuk menyusun program kerja tahunan yang bertanggung jawab melaporkan kepada kepala sekolah. Kepengurusan organisasi ini di bentuk berdasarkan Surat Keputusan kepala sekolah selama periode satu tahun. Divisi dan Job Description dalam organisasi PPKS meliputi bidang pemetaan bakat minat (karir kejuruan & Pendidikan Tinggi Vokasi), Bidang Training (multi kompetensi dan wirausaha), Bidang kerjasama industri (PKL, kelas vokasi industri), Bidang Publikasi (Expo/pameran dan penelusuran tamatan), Bidang BKK (pemasaran dan penyaluran tamatan).

f. Penelusuran Alumni (Tracer Study)

Salah satu program Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Humas adalah penelusuran alumni sebagai upaya pemetaan keterserapan alumni di dunia kerja dalam rangka pelaporan ke Dinas Pendidikan SMK. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah maupun sekolah dalam upaya peningkatan kualitas lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

3.2. Kemitraan sebagai sebuah strategi dalam peningkatan mutu dan layanan sekolah, serta Promosi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pendidikan yang bermutu tidak dapat hanya dilihat dari kualitas lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orangtua, masyarakat dan pemakai lulusan). Pelanggan utama dalam sekolah adalah siswa yang secara langsung menerima jasa pendidikan. Sebagai pelanggan utama siswa memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda-beda terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak sekolah. Pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, keunggulan bersaing sering diupayakan dalam bentuk pelayanan yang unggul. Strategi yang tepat dan akurat dalam kualitas layanan merupakan faktor penting yang mempengaruhi keunggulan bersaing bila direncanakan dan diimplementasikan dengan tepat (Ulum dan Ismanto, 2017: 31).

Selain dari kemitraan yang di bangun oleh SMK “DP”, sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan Islam di wilayah Jakarta Timur selama 26 tahun ini juga memiliki banyak program unggulan yang menjadi ciri khas SMK “DP” dan cukup dikenal oleh masyarakat luas. Terdapat beberapa program unggulan SMK “DP” yang tidak dimiliki sekolah lain, diantaranya adalah penerapan kedisiplinan tata tertib sekolah yang cukup ketat, penguatan karakter keagamaan melalui program Bina Santri, dan

budaya sekolah yang santun dan berbudi pekerti., serta penerapan kedisiplinan, ketertiban, keindahan, kerapihan, kebersihan (K5). Hal inilah yang menjadi daya tarik dan menjadi sebuah bentuk kepercayaan dari masyarakat untuk mendaftarkan sekolah ke SMK “DP”.

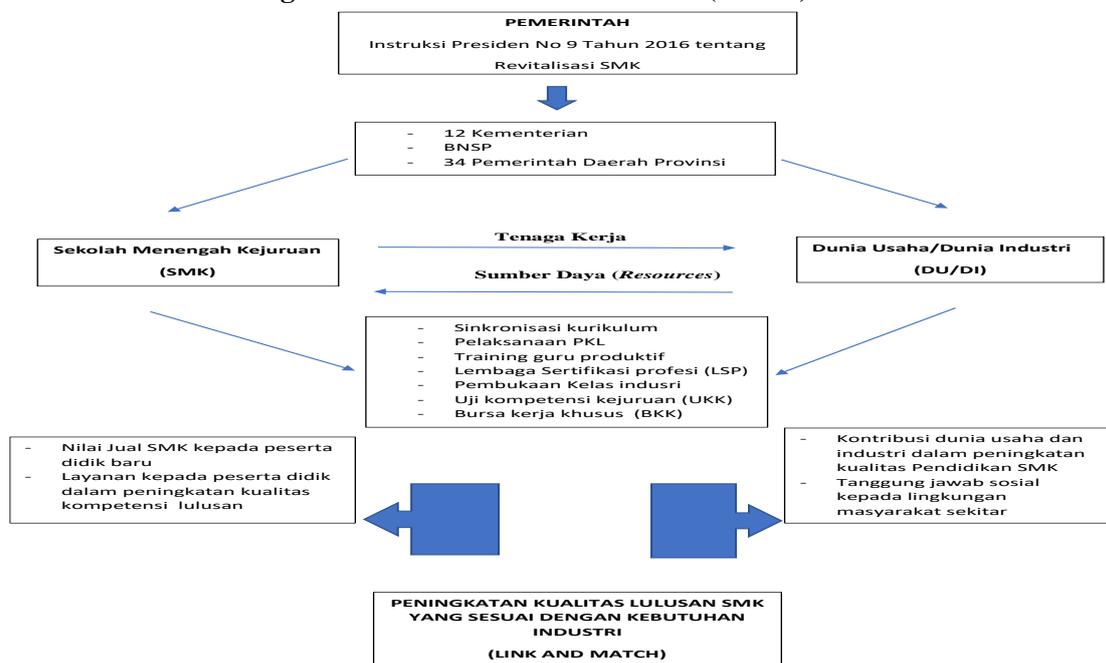
Program unggulan yang di bangun dan di kembangkan oleh SMK “DP” menjadi penunjang dalam pelaksanaan kemitraan SMK dengan DU/DI. Program unggulan ini yang kemudian disampaikan oleh SMK “DP” kepada DU/DI sebagai bentuk promosi untuk dapat menjalin kerjasama melalui kemitraan. Jumlah SMK yang cukup banyak di sekitar wilayah SMK “DP” menyebabkan terjadinya kompetisi dalam menjalin kemitraan dengan DU/DI yang jumlahnya cukup terbatas. Oleh karena itu, SMK “DP” berusaha meyakinkan kepada DU/DI bahwa SMK “DP” 1 memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, peserta didik yang memiliki budi pekerti dan kedisiplinan yang tinggi, sehingga kemitraan yang dibangun dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang di harapkan.

3.3. Kerangka Konsep/Teori Pengertian Kemitraan

Menurut undang-undang Republik Indonesia N0. 9 Tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan adalah strategi yang diciptakan untuk melibatkan pihak lain dalam bentuk partisipasi yang berdasarkan prinsip *mutual benefit gains* (Wong, Fearon and Philip, 2007). Menurut Haman (2004 : 23), konsep kemitraan adalah : *“A partnership is a business owned by two or more people, who share in the profits or losses”*. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa secara praktis, kemitraan menjadi alat untuk memperoleh keuntungan nilai bagi kedua belah pihak. Sama halnya dengan pendapat Todd (2007 : 5), yang menyatakan bahwa : *“School partnerships can be done with students, parents and industry or professional circles”*. Tujuan dari kemitraan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong meningkatnya modal manusia. Keterlibatan DU/DI dalam meningkatkan kompetensi para lulusan merupakan sebuah investasi dalam rangka mendorong meningkatnya kualitas SDM yang pada akhirnya akan di rekrut oleh DU/DI.

Menurut Ian Smith (2006), Henrietta Bernal et, all. (2004) kerjasama kemitraan pada dasarnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih yang memiliki kedudukan atau tingkatan yang sejajar dan saling menguntungkan. Kerjasama kemitraan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama. Sekolah perlu membangun sinergi dengan dunia industri, salah satunya dengan membuat program kerjasama kemitraan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan dunia industri. Jika fungsi-fungsi strategis stake holder sekolah benar-benar dijalankan, maka kerjasama kemitraan antara sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan saling menunjang.

Kemitraan SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI)



Gambar 1. Skema Kemitraan antara SMK dengan DU/DI sebagai Implementasi Revitalisasi SMK. Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*) menurut Coleman

Pembahasan mengenai Kemitraan SMK dengan DU/DI akan banyak bersinggungan dengan dimensi Sosiologis, sehingga teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam menganalisa kemitraan adalah Teori Sosiologi. Kajian dalam penelitian ini lebih menekankan pada pola interaksi dan relasi antara SMK dengan DU/DI, dimana keduanya merupakan elemen-elemen sosial yang keberadaannya turut memberikan kontribusi dan dukungan terhadap perkembangan Pendidikan SMK. Dalam hal ini sekolah bukanlah sebuah institusi yang dapat berdiri sendiri, sehingga membutuhkan kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya. Oleh karena itu masing-masing elemen tersebut dapat berarti manakala di gerakkan secara sinergis untuk mendukung perkembangan SMK. Elemen-elemen kekuatan sosial tersebut di kenal dengan istilah Social Capital atau modal sosial, oleh karenanya teori yang digunakan dalam kajian kemitraan ini adalah Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*).

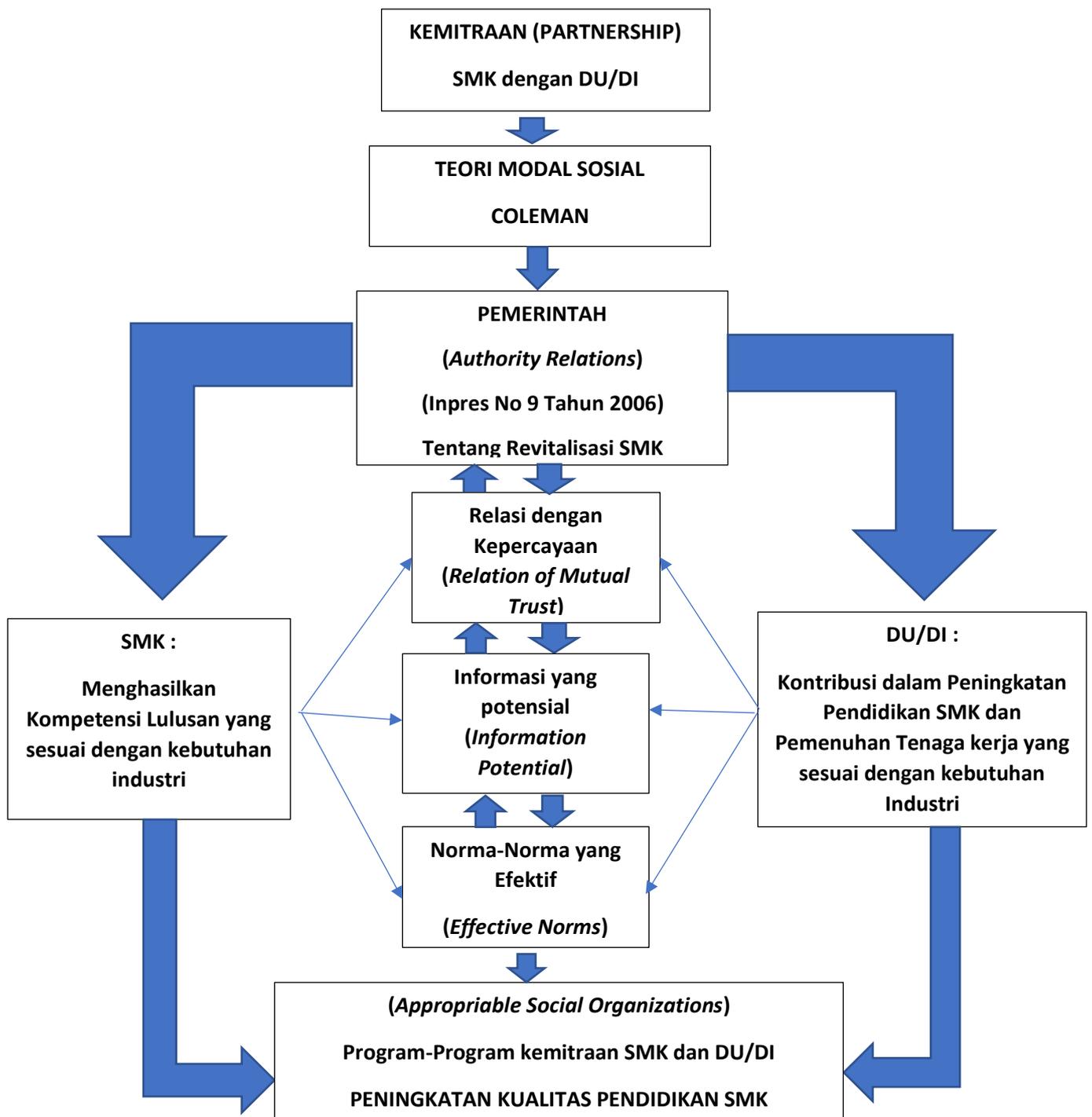
Bentuk-Bentuk Modal Sosial

Menurut Julia Hauberer dalam bukunya *Social Capital theory, Towards a Methodological Foundation* (2011 : 42), Coleman membedakan modal sosial ke dalam beberapa bentuk :

Coleman differentiates between the kinds of social capital. Social capital remains in relations that are based on mutual trust or authority. Both create familial networks and appropriate social organization. Relations are characterized by information potentials and effective norms.

Tabel 1 Lima Bentuk Modal Sosial Menurut Coleman dalam Kemitraan SMK dengan DU/DI

No	Modal Sosial	Deskripsi
1.	<i>Relation of Mutual Trust</i>	a. Kerjasama yang sinergis antara sekolah dengan DU/DI b. Menjadi sekolah percontohan dalam implementasi Revitalisasi SMK. c. Mendapat stigma dari masyarakat sebagai sekolah kejuruan yang menghasilkan lulusan yang cepat dapat kerja. d. Menjadi SMK swasta dengan peserta didik terbanyak di wilayah Kotamadya Jakarta Timur.
2.	<i>Authority Relations</i>	a. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 mengenai Revitalisasi SMK. b. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2019 yang mengatur pemberian insentif super deduction sebesar 200 % bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi
3.	<i>Information Potential</i>	a. Rapat koordinasi dengan DU/DI dalam rangka persiapan Uji Praktik Kejuruan (2018). b. Rapat periapan Uji Kompetensi Kejuruan (UKK) dan evaluasi kerjasama dengan DU/DI (2019). c. Pertemuan antara SMK DP dengan perwakilan perusahaan dalam rencana pembentukan kelas vokasi industri (2019).
4.	<i>Norms and Effective Sanction</i>	a. Memorandum Of Understanding (MOU) pembentukan kelas vokasi industri. b. MOU antara SMK “DP” dengan DU/DI dalam pelaksanaan PKL. c. Norma dalam tata tertib sekolah untuk memperkuat nilai-nilai dalam diri peserta didik, antara lain nilai kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, keagamaan, kebangsaan, dan lain-lain.
5.	<i>Appropriable Social Organization</i>	Pembentukan Komite Sekolah sebagai upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di SMK. Sesuai dengan Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Komite Sekolah, SMK “DP” telah membentuk komite sekolah yang anggotanya terdiri dari perwakilan orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat. Pembentukan komite sekolah ini di harapkan mampu memaksimalkan perannya dalam peningkatkan mutu sekolah dengan menerapkan prinsip gotong royong, baik dalam penggalangan dana, maupun pengawasan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.



Gambar 2. Skema kerangka konsep/kerangka teori

4. KESIMPULAN

4.1. Peran Modal sosial dalam Kemitraan SMK dengan DU/DI

Modal sosial menurut Coleman meliputi, modal fisik, modal manusia dan modal sosial. Modal fisik meliputi benda yang terlihat nyata seperti uang, bangunan, peralatan, serta sarana-prasarana pendukung lainnya. Modal manusia yang dimiliki SMK "DP" adalah figur pimpinan yayasan dan kepala sekolah yang menjadi roda penggerak peningkatan kualitas SMK "DP" melalui implementasi Revitalisasi SMK. Modal sosial yang terdiri dari lima bentuk terdiri dari relasi yang dilandasi saling percaya (*Relations of Mutual Trust*), relasi kekuasaan (*Authority Relations*), informasi potensial (*Information Potential*), norma-norma yang efektif (*Effective Norms*), organisasi yang disesuaikan (*Appropriable Social Organization*).

Relasi yang dilandasi saling percaya di buktikan dengan kemitraan yang dibangun oleh SMK "DP" dengan 22 perusahaan melalui MOU. Kemitraan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan PKL, UKK (Uji Kompetensi kejuruan), pembentukan kelas vokasi industri, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP) P-1, dan Bursa Kerja Khusus (BKK). Kemitraan antara SMK "DP" dengan DU/DI terselenggara karena dorongan dan tuntutan dari pemerintah melalui Inpres No 09 Tahun 2016, hal inilah yang menandai adanya relasi kekuasaan dari pemerintah untuk mewujudkan peningkatan Pendidikan SMK. Kemitraan ini dapat berjalan secara berkelanjutan dengan mengedepankan informasi potensial melalui komunikasi antara SMK "DP" dengan DU/DI. Kesepakatan yang di perpegas melalui MOU semakin meyakinkan kedua belah pihak agar bisa mematuhi norma-norma yang efektif yang berlaku, sehingga kemitraan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu SMK "DP" juga melibatkan organisasi komite sekolah yang dibentuk untuk mendukung segala kegiatan sekolah, organisasi yang disesuaikan ini ikut memperkuat upaya sekolah dalam menggapai tujuan yang diharapkan.

4.2. Kemitraan sebagai implementasi Revitalisasi SMK

SMK "DP" menyambut baik adanya Inpres No 9 Tahun 2016 mengenai revitalisasi SMK dan berusaha mengikuti arahan dari kementerian terkait untuk mengimpementasikannya. Kemitraan yang dilakukan oleh SMK "DP" bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri (*demand driven*), menyalurkan lulusan ke dunia kerja melalui Bursa Kerja Khusus (BKK), dan lebih diperkuat lagi dengan pembentukan organisasi Pusat Pengembangan Karis Siswa (PPKS). SMK "DP" berusaha memberikan pelayanan terbaik dimulai dari pelaksanaan PKL yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajarinya, peningkatan kualitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), penempatan lulusan ke dunia kerja, dan penelusuran alumni (*tracer study*). Persentase lulusan yang bekerja, tidak bekerja, dan berwirausaha dapat diketahui melalui penelusuran alumni, data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh SMK "DP" sekaligus menjadi masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai SMK

5. Saran

5.1. Bagi sekolah

SMK "DP" diharapkan dapat terus meningkatkan layanan dalam hal kualitas kegiatan belajar mengajar (KBM), penyelarasan kurikulum dan silabus SMK yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta kualitas kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. SMK "DP" harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat yang memiliki harapan besar bahwa lulusannya dapat memiliki kompetensi yang siap kerja maupun berwawasan wirausaha (*entrepreneurship*).

Memperkuat dan memperluas jaringan kemitraan Bersama DU/DI, agar dapat memanfaatkan sumber daya untuk menunjang peningkatan kualitas SMK.

5.2. Bagi DU/DI

Perusahaan yang mewakili DU/DI hendaknya terus meningkatkan kepedulian dan kontribusi nyata dalam peningkatan Pendidikan SMK melalui kerjasama yang saling menguntungkan. DU/DI diharapkan dapat membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada SMK dalam upaya penyelarasan kurikulum berbasis industri dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

5.3. Bagi Pemerintah

Meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap implementasi Revitalisasi SMK dan semua sektor yang terkait, sehingga hasilnya lebih maksimal dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Meningkatkan stimulus terhadap DU/DI agar dapat berkontribusi secara maksimal, sehingga kemitraan yang dibangun antara SMK dengan DU/DI dapat memberikan keuntungan yang sepadan antara kedua belah pihak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2012. Implementasi Manajemen Strategik Berbasis Kemitraan Dalam Meningkatkan Mutu SMK. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Vol.XIV No.1 April 2012|61-62. Diakses pada tanggal 06 November 2019 Pukul 10.55 WIB.
- Coleman, James S. 1988. *Social Capital in the Creation of Human Capital' American Journal of Sociology* 94 : S95-S120.
- Coleman, James S. 1990. *Foundations of Social Theory*. Chambridg, Mass : Harvard University Press.
- Cresswell W Jhon. 2010. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Kilasan Dua Tahun Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan September 2016-2018.
- Febrianti, Julia. 2014. *Manajemen Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Jakarta dengan Dunia Usaha/Dunia Industri*. Disertasi, tidak diterbitkan. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
- Mulyasa, E. 2012. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*. Bandung : penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Sumarno. 2008. *Employability Skills dan Pengaruhnya terhadap penguasaan Lulusan SMK Teknologi dan Industri*, *Jurnal Kependidikan Lembaga Penelitian UNY*, Tahun XXXVIII, Nomor1, Mei 2008. Yogyakarta : LLPM UNY.
- Suryadi. 2010. "Permasalahan dan Alternatif Kebijakan Peningkatan Relevansi Pendidikan (Studi Relevansi Pendidikan Kerjasama UPI dengan Balitbang Kemendiknas)". http://file.upi.edu/Direktori/PROCEEDING/Seminar_Internas.NFE
- Tyagita, Brigitta. Putri Atika dan Padmini, Kristiana Hesti. 2015. *Edupreneur dalam Peningkatan Mutu Lulusan SMK*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. ISBN : 978-602-8580-19-9. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 10.30 WIB.
- Ulum, Miftahul dan Ismanto, Bambang, 2017. Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Pasca Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, vol 27, No 1, Juni, 2017, ISSN : 1412.3835/69-91. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 09.56 WIB.
- Ulum, Miftahul dan Ismanto, Bambang, 2017. Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Pasca Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, vol 27, No 1, Juni, 2017, ISSN : 1412.3835/69-91. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 09.56 WIB.